Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses

Ali Habib

bi_jaksa@yahoo.com

Kejaksaan Negeri Talang Padang

Submitted: Mar 2, 2020; Reviewed: Mar 27, 2020; Accepted: Apr 17, 2020

Info Artikel

Kata Kunci: *Restorative; Korupsi; Kejaksaan.*

Keywords: *Restorative; Corruption; attorney.*

DOI:

<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069>

Abstrak

Penanganan tindak pidana korupsi saat ini memang lebih berorientasi terhadap bagaimana memasukkan para koruptor sebanyak-banyaknya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan korupsi sendiri masih tetap merajalela. Efek jera yang saat ini sudah tidak lagi dirasakan oleh para terpidana korupsi ketika menjalani hukuman penjara serta meluapnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak mencukupi lagi, membuat pemerintah bergerak cepat dan mencari suatu terobosan hukum terkait penurunan tingkatan korupsi di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu Penegak Hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE Jampidsus) Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018

tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya Penyelidikan harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara, yang dimaksudkan sikap kooperatif dari pihak yang terlibat untuk pengembalian kerugian keuangan Negara, dapat dijadikan pertimbangan tidak dilanjutkannya proses hukum yang tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu (*restorative justice*). Permasalahannya adalah bagaimanakah penerapan model *restorative justice* dalam upaya pengembalian kerugian Negara. Dalam pembahasan penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, penerapan metode *restorative justice* yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan RI dapat secara optimal digunakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya untuk pemulihan keuangan Negara serta harapan di masa mendatang terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Abstract

The Handling of corruption now is indeed more oriented to how to put as many corruptors as possible into a Penitentiary, while corruption itself is still rampant. The deterrent effect which is currently no longer felt by corruption convicts while serving prison sentences and the overflow of prisoners who are no longer sufficient, makes the government move quickly and look for a legal breakthrough related to reducing the level of corruption in Indonesia. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (RI) as one of the Law Enforcement Officers who have the authority to carry out Corruption Criminal Investigations has issued a Circular Letter for the Deputy Attorney General for Special Crimes (SE Jampidsus) Number: B-765/F/Fd.1/04/2018 dated April 20 2018

concerning the Technical Guidelines for Handling Corruption Case Investigation Stage, which in essence the Investigation must be strived to find the amount of State Financial Losses, which meant the cooperative attitude of the parties involved to recover the financial losses of the State, it can be taken into consideration as a non-continuation of the legal process which certainly takes into account certain limitations (restorative justice). The problem is how to apply the restorative justice model in an effort to recover state losses. The research results obtained are, the application of restorative justice methods conducted by the Republic of Indonesia's Attorney General's Office can be optimally used in handling corruption cases specifically for the recovery of state finances and future expectations related to handling cases of corruption in Indonesia.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu fenomena umum dan universal yang sekarang terjadi berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tingkatan indeks korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan yang terjadi di segala lini pembangunan. Praktek korupsi yang berkembang dari tahun ke tahun yang terus meningkat, baik dilihat dari jumlah perkara ataupun jumlah kerugian keuangan negara sudah mewabah dalam seluruh aspek masyarakat. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.¹ Hal yang dikhawatirkan dari efek peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, yang tentunya berdampak kepada tindak pidana korupsi yang tentunya tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Tindak Pidana di Indonesia berkembang secara sistematis. Beberapa bentuk tindak pidana terkadang dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum bahkan ada yang menganggap sebagai sekedar suatu kebiasaan.² Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sering dianggap sebagai suatu perbuatan yang *beyond the law*, karena pelaku kejahatan yang terlibat sudah di taraf ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrat (*high level beurocratic*). Perbuatan korupsi yang sudah melibatkan pihak penguasa ini tentunya akan menjadi sangat sulit dalam hal proses pembuktiannya. Keinginan adanya pemberantasan korupsi pada kenyataannya terbentur dengan kepentingan dari penguasa yang

¹ Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 No.2 Desember (2015), hlm. 270.

² Fitriati, "Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal melalui Peradilan Adat", *Jurnal Media Hukum*, VOL.24 NO.2 Desember (2017), hlm. 165.

biasanya melibatkan para birokrat tersebut yang berakibat pernyataan bahwa korupsi ini adalah perbuatan yang *untouchable by the law* serta *beyond the law*.³

Korupsi saat ini dianggap sebagai hal yang biasa, dengan alasan yang biasa diucapkan oleh pihak yang terlibat yaitu sudah prosedural. Para pihak yang terlibat tersebut sudah tidak takut dan merasa malu, bahkan banyak yang memamerkan hasil korupsinya secara terang-terangan. Senyatanya perbuatan korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena berakibat kepada stabilitas dan keamanan Negara yang dibahayakan oleh tindak pidana tersebut. Pembangunan sosial, politik serta ekonomi tentunya akan sangat terganggu, bahkan dapat merusak nilai-nilai yang berkembang di masyarakat karena dapat berdampak membudayanya perbuatan korupsi tersebut. Hal utama yang harus diperhatikan dari peningkatan tindak pidana korupsi yaitu akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara yang berakibat kepada roda perekonomian tetapi juga kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Diperlukan suatu terobosan hukum atau penanganan yang luar biasa untuk menanggulangi perbuatan korupsi karena, tindak pidana korupsi sudah berkembang menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Fakta bahwa penanganan tindak pidana korupsi saat ini lebih berorientasi terhadap bagaimana memasukkan para koruptor sebanyak-banyaknya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipungkiri, sedangkan korupsi sendiri masih tetap merajalela. Efek jera yang saat ini sudah tidak lagi dirasakan oleh para terpidana korupsi ketika menjalani hukuman penjara serta meluapnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak mencukupi lagi, membuat pemerintah bergerak cepat dan mencari suatu terobosan hukum terkait penurunan tingkatan korupsi di Indonesia.

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, telah mengeluarkan SE Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya dalam tahapan penyelidikan tidak hanya berorientasi untuk menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, namun juga harus diupayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan Negara untuk pembangunan nasional.⁵

Besaran kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan perhitungan sendiri atau bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/ Akuntan Publik inilah yang dijadikan dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat untuk pengembalian kerugian keuangan Negara, dapat dijadikan pertimbangan tidak dilanjutkannya proses hukum yang tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.⁶

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk terobosan hukum dalam hal pemulihan Keuangan Negara, sehingga bentuk penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak seluruhnya berorientasi kepada bentuk penindakan saja tetapi dengan pengupayaan pemulihan Keuangan Negara secara utuh. Hal ini sebetulnya juga masih dapat menjadi

³ Indriyanto Seno Adji. 2012. *Korupsi Dan Permasalahannya*, 2012: Diadit Media Press. hlm. 27

⁴ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 3

⁵ Pandoe Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto dan I Made Agus Mahendra Iswara. "Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo", *Jurnal Hukum Sarawati (JHS)*. Vol. Vol. 1 No. 2 (2019). hlm. 275.

⁶ Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo*, 2 (2), (2018).

peraturan dalam hal penegakan hukum secara profesional dan proporsional karena dapat membuka celah penyimpangan dalam pelaksanaannya serta bila ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 4 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila ada bentuk pengembalian kerugian keuangan Negara tidak semata-mata akan menghapuskan pidananya yang diatur di dalam dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penerapan model *restorative justice* dalam upaya pengembalian kerugian Negara termasuk prosedur, efektifitas serta harapan penanganan ke depannya.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode yuridis empiris guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif. Metode yuridis normatif digunakan dalam terkait hal-hal yang menyangkut ketentuan baik masalah peraturan perundangan, teori yang berkaitan, konsep-konsep serta peraturan lain yang masih berkaitan dengan pokok permasalahan.

B. Pembahasan

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga/aparat penegak hukum yaitu :

- a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Kepolisian Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi hampir sama dengan penanganan perkara tindak pidana umum/lainnya, yaitu tetap meliputi :
 - 1) Tahap penyelidikan, yang dilakukan oleh tim penyelidik guna mencari peristiwa pidana sehingga dapat menentukan arah apakah harus ditingkatkan ke tahapan penyidikan.
 - 2) Tahap penyidikan, dilakukan oleh Tim Penyidik untuk mencari dan pengumpulan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan dapat dilakukan penetapan tersangka, yang sesuai dengan cara yang diatur oleh peraturan perundangan.
 - 3) Tahap penuntutan, dilakukan oleh tim penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (khusus untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - 4) Tahap eksekusi, dilaksanakan oleh tim eksekutor/pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang dilakukan oleh jaksa setelah salinan putusan kepadaanya.⁸

⁷ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2, Desember (2014), hlm. 175

⁸ Reda Manthovani. 2019. *KUHAP dilengkapi perubahan pasal akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan beracara lainnya di berbagai peraturan perundang-undangan*: UAI Press. hlm. 2 dan 438

Perbedaan mendasar korupsi dengan tindak pidana umumnya yakni penanganan perkara tindak pidana korupsi menganal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sesuai dengan amanah dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis hukuman atau sanksi pidana dijelaskan bahwa dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dalam pidana tambahan hanya mengenal pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim yang terhimpun dalam pidana tambahan.⁹

Indonesia dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi selama ini lebih mengedepankan ke arah pemidanaan sebagai bentuk pelaksanaan penindakan. Hal ini sebenarnya lebih didasarkan ke arah bagaimana seseorang dipidana, sehingga orang lain tidak melakukan hal yang sama (*shock therapy*). Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).¹⁰ Menurut Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.¹¹ Fakta bahwa penanganan tindak pidana korupsi saat ini lebih berorientasi terhadap bagaimana memasukkan para koruptor sebanyak-banyaknya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipungkiri, sedangkan korupsi sendiri masih tetap merajalela. Para terpidana korupsi pada kenyataannya sudah tidak lagi merasakan efek jera.

Fakta yang terjadi para terpidana yang sudah dijatuhi hukuman pidana badan oleh putusan Pengadilan, kenyataan adalah yang bersangkutan tidak akan lagi melakukan pembayaran denda apalagi pembayaran uang pengganti, karena berasumsi mengapa harus membayar lagi uang pengganti, sedangkan terpidana sudah dikenakan hukuman badan. Penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua lembaga pengadilan yakni, Pengadilan Tipikor dan Pengadilan umum.¹² Penggunaan anggaran Negara dalam tahapan proses penanganan perkara yang cukup besar, seperti di lembaga Kejaksaan RI yang untuk 1 (satu) perkara dimulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan eksekusi dianggarkan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tentunya akan menjadi sia-sia apabila tidak diimbangi dengan upaya pemulihan keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi tersebut.

2. Pendekatan metode *restorative justice* dalam upaya pemulihan keuangan Negara

Metode *Restorative Justice* lebih mengedepankan tujuan restorasi kerugian yang diderita oleh korban menjadi pulih seperti semula. Pendekatan *Restoratif Justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *Premium Remidium* menjadi *Ultimum Remidium*. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.¹³

Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sudah mulai dilakukan oleh lembaga Kejaksaan RI dengan dikeluarkannya SE Jampidsus Nomor: B-

⁹ Fernando I Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3. No. 3. Mei-Juli (2014).

¹⁰ Yuda Musatajab dan Mulyadi A. Tajuddin, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Restorative Justice* Vol. 2 No.1, (2018). hlm. 55.

¹¹ Utary Maharani Barus, Isnaini, "Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Lubuk Pakam", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1 No. 2 (2019). Hlm. 190.

¹² M.Syamsudin, "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 3 (2010). hlm.411.

¹³ Budi Suhariyanto, "Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3 Desember (2016). hlm.422.

765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya Penyelidikan tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara.

Surat edaran tersebut mempunyai makna bahwa setelah besaran kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan perhitungan sendiri atau bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Akuntan Publik dikeluarkan, selanjutnya dijadikan dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat dalam upayanya mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka dijadikan suatu pertimbangan terkait kelanjutan proses hukumnya.

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan metode *restorative justice* ini tentunya menjadi anggapan/stigma negative di masyarakat yang menganggap tidak masalah melakukan perbuatan koruptif karena apabila ditindak, yang bersangkutan tinggal mengembalikan keuangan negara saja. Sedangkan maksud dari dikeluarkan kebijakan tersebut tentunya tetap ada yang menjadi batasan-batasan antara lain :

- a. Bukan merupakan perkara *big fish* yaitu pelakunya adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, melibatkan pelaku dari satu dan/atau lebih kementerian/ lembaga lainnya bersama dengan pelaku di lembaga legislatif dan/atau lembaga yudikatif, baik di pusat maupun daerah dengan pelaku swasta, pelanggaran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan yang berbeda, penggunaan alat bukti konvensional yang dalam hal sesuai dengan Pasal 184 KUHP.¹⁴ Penambahan *digital evidence* dan dilakukan pada saat terjadi bencana atau menimbulkan kerugian keuangan Negara diatas Rp. 10 Milyar rupiah untuk delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan delik di luar itu senilai Rp. 1 Milyar rupiah.¹⁵
- b. Adanya rasa kesadaran dari pihak yang terlibat bersikap proaktif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
- c. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak bersifat berkelanjutan.
- d. Dampak yang ditimbulkan oleh penyelesaian tindak pidana korupsi tetap memperhatikan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan Nasional.

Besaran kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan menjadi salah satu pertimbangan oleh lembaga Kejaksaan RI dalam hal penindakannya. Nilai kerugian Negara yang kecil tentunya dibandingkan dengan anggaran Negara yang dikeluarkan dalam proses penindakan tentunya tidak akan seimbang, hal inilah yang mendorong metode *restorative justice* yaitu untuk memberikan keadilan bagi pelaku dan korban yang tentunya sesuai bila dilihat dari kerugian yang dialami dan hal ini telah sesuai dengan intruksi Jaksa Agung RI dalam hal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung RI dalam bidang penyidikan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.¹⁶ Dengan demikian diperlukan upaya identifikasi, Analisa, sekaligus pemetaan yang komprehensif terhadap akar masalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, guna diformulasikan langkah-langkah perbaikan serta diperlukan upaya untuk memonitor setiap

¹⁴ Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S dan Agus H. Rahim, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik", *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2. No. 2 (2016). hlm.158.

¹⁵ Surat Edaran Jampidsus Kejaksaan RI Nomor: B-345/F/Ejp/05/2018 tertanggal 04 Mei 2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas

¹⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, "Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Researh Sains*, Vol. 1 No. 3 Oktober (2015). hlm.118.

kebijakan guna melihat tingkat kerawanan akan potensi terjadinya praktik korupsi, sehingga kedepannya potensi tindak pidana korupsi dapat diantisipasi dan dicegah.¹⁷

Bentuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan konsep *Restoratif Justoce* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan.¹⁸ Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi *restorative justice* antara lain tetap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu di bidang Tindak Pidana Khusus yang mana penanganan tindak pidananya mulai dari janmnga waktu dan lain-lain mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010.¹⁹ Penanganan tersebut meliputi:

- a. Dalam tahapan penyelidikan, dilakukan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan.
- b. Dalam tahapan tersebut, juga sudah harus ada ditemukan besaran kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan perhitungan baik sendiri, bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BKPP/ Akuntan Publik.
- c. Memperhatikan batasan tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, apabila pihak yang terlibat sudah mengembalikan keuangan Negara maka perlu dibuktikan dengan bukti setoran Kas Negara/daerah/desa/pekon.
- d. Dilakukan kegiatan ekspose guna menentukan sikap dan disini peran dari pimpinan, dalam hal ini yaitu Jaksa Agung RI/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sangat diperlukan karena tidak diatur dengan Undang-Undang melainkan salah satu bentuk diskresi.

Tidak semua jenis korupsi dapat diselesaikan melalui metode *restorative justice*, karena perkara korupsi yang dapat diselesaikan adalah perkara yang tidak masuk dalam batasan-batasan yang disebutkan sebelumnya serta kategori ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan nilai kerugian serta bentuk tindak pidana korupsinya, yaitu di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).²⁰

1. Efektifitas Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan serta harapan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di masa depan

Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai dasar untuk dapat mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, dengan didasarkan pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang RI nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada intinya menyatakan kewenangan Jaksa Agung dalam penetapan, pengendalian kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang masih tetap dalam ruang lingkup Kejaksaan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, tentunya dengan dikeluarkan surat edaran ini, telah mempunyai kekuatan hukum, karena dalam Undang-Undang tersebut, telah diberikan

¹⁷ Amanat Jaksa Agung RI dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019

¹⁸ Yusona Piadi, dan Rida Ista Sitepu, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Recthen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1 (2019).

¹⁹ Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan dan Mahfud, "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2. No. 2. Agustus (2018). hlm. 176.

²⁰ B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negeranya Kecil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I.* Jakarta Selatan. hlm.21

kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memberikan suatu kebijakan kepada jajarannya dalam hal pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan RI.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi dasar legalitas dan legitimasi tindakan pemerintahan, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kedudukan hukum warganegara terhadap pemerintah (*het legaliteits beginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen*). Terkait hal tersebut, dijelaskan bahwa dalam paham negara hukum, pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan/tindakan harus berdasarkan peraturan yang sah dan wajib tertulis. Peraturan tersebut harus ada terlebih dahulu dan berlaku sebelum adanya tindakan atau kebijakan administratif yang dilakukan. Oleh karenanya, dalam setiap kebijakan administratif harus tetap berdasarkan aturan atau *rules and procedures (regels)*.²¹

Penyelenggaraan pemerintahan dalam perkembangannya berdasarkan pada asas kepastian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan khususnya dalam hal kesenjangan hukum (*legal gap*) antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh pemerintah.²² Tidak ada peraturan/undang-undang yang pasti sempurna, karena didalamnya pasti terdapat kekurangan bila ditinjau dari sisi yang berbeda serta tidak ada peraturan/undang-undang yang pasti sudah lengkap atau jelas khususnya dalam pengaturan setiap langkah kegiatan dari warganya. Menurut Shidarta hal ini disebabkan karena suatu produk hukum adalah hukum positif, yang digambarkan dalam potret kehidupan masyarakat dalam waktu-waktu tertentu (*sinkronis*). Gambaran ini tentunya mencerminkan sistem hukum sebagai karya yang momentaris (*momentary legal system*). Disisi lain, disadari atau tidak disadari masyarakat senantiasa berproses sedangkan produk hukum cenderung mengkristal. Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau yang lazim disebut *dengan freies ermessen/ discretionary power* (diskresi).²³

Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang.²⁴ Adapun perwujudan dari diskresi yang sering digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels*), dapat dibuat dalam bentuk, yang salah satunya adalah berupa surat edaran. Bagir Manan menyatakan bahwa yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak termasuk kebijakan yang dibuat walaupun kebijakan tersebut ada gambaran sebagai peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dilaksanakan tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena pembuat kebijakan tersebut tidak memiliki suatu bentuk kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁵

Berbicara tentang Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu di Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2019 sudah dilakukan metode *restorative justice* ini yaitu 1 (satu) penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara. Selain itu, Kejaksaan Negeri Pringsewu juga di Tahun 2018 juga sudah melaksanakan metode tersebut untuk 3 (tiga)

²¹ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)* hlm. 124-125.

²² Shidarta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Thafa Media. hlm 27

²³ Ibid hlm 27-28

²⁴ Marcus Lukman. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi (Universitas Padjajaran 1996) hlm. 205.

²⁵ Bagir Manan. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni. hlm.169

perkara yang apabila ditotal adalah sebesar + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas Negara.

Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Pringsewu juga tetap melaksanakan kegiatan penuntutan terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu untuk Kejaksaan Negeri Tanggamus di Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara dan Kejaksaan Negeri Pringsewu sebanyak 3 (dua) perkara (tahun 2019 sebanyak 1 perkara), karena tidak semua perkara yang nilai kerugiannya besar, dapat diselesaikan dengan metode *restorative justice*, karena dapat dilihat dari kategorinya, termasuk apakah ada perbuatan yang langsung menyentuh pemberian dana kepada masyarakat, dalam hal pengembalian kerugian Negara dilakukan secara sadar atau tidak, serta perbuatan koruptif tersebut apakah merupakan perbuatan yang berkelanjutan.

Metode *restorative justice* pun hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyelidikan karena *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana²⁶, hal ini sesuai dengan SE Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, hanya dikonsentrasikan dalam tahapan tersebut. Apabila sudah masuk dalam tahapan penyidikan maka tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan apabila telah terpenuhi segala unsur dari pasal 2 dan pasal 3, maka bentuk pengembalian kerugian Negara tidak serta merta menghapuskan pidananya. Oleh karenanya bentuk pengembalian kerugian Negara sebelum tahapan penyidikan dapat menggugurkan salah satu unsur yaitu kerugian Negara, karena apabila tahapan penyidikan sudah dimulai, maka pengembalian kerugian Negara hanya dianggap sebagai bentuk kesadaran terkait fungsi penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah serta dapat dianggap juga sebagai bentuk pengakuan bersalah oleh si terdakwa. Walaupun pihak yang terlibat sudah berupaya mengembalikan kerugian Negara namun sudah masuk dalam tahapan penyidikan bahkan sudah masuk dalam proses penuntutan, maka pengembalian tersebut dijadikan faktor yang meringankan dalam pertimbangan surat tuntutan penuntut umum serta pertimbangan dalam putusan pemidanaan oleh Majelis Hakim.

Idealnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, selain dengan penerapan metode *restorative justice*, perlu adanya suatu bentuk sanksi tambahan yang dikenakan oleh daerah/instansi pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus lebih aktif dalam pemberian sanksi tersebut. Contohnya mungkin dapat diterapkan antara lain :

- a. Pemberhentian dari jabatan aktif.
- b. Penundaan pangkat/kenaikan gaji berkala (administratif).
- c. Tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik/penyediaan jasa yang menggunakan anggaran Negara ke depannya, serta contoh-contoh lainnya, serta tentunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi tambahan tersebut tentunya harus disertai juga dengan payung hukum yang menunjang, oleh karenanya sangat diperlukan suatu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna menunjang pelaksanaan metode *restorative justice* serta sanksi tambahan lainnya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi ke depan tentunya diharapkan lebih berkonsentrasi bagaimana uang Negara yang sudah hilang karena perbuatan-perbuatan koruptif dapat dipulihkan. Inisiatif lembaga Kejaksaan RI dalam upaya pemulihan melalui metode *restorative justice* dapat menjadi suatu solusi yang sangat baik.

²⁶ Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman*. Vol. 12. No. 3 (2012). hlm.409

Langkah lain yang dapat dilakukan apabila melihat dari Negara lain seperti pendekatan *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement*. *Plea Bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “Kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.”²⁷ *Plea Bargaining* merupakan proses awal yang dilakukan oleh penuntut umum dalam bentuk penawaran kepada terdakwa untuk pengakuan bersalah secara sadar, yang juga digunakan untuk pemenuhan pengembalian kerugian Negara dalam bentuk penyitaan aset, guna pengurangan tuntutan pidananya. Sedangkan untuk *deferred prosecution agreement* lebih dikhususkan kepada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, yaitu dalam bentuk pengalihan tuntutan pidana menjadi pemulihan secara administratif, yang tentunya berimbas kepada reputasi yang tetap baik serta dapat mengurangi kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan apabila proses hukum tetap berjalan (terkait lama proses hukumnya). Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan dapat cepat terlaksana serta tujuan pengembalian kerugian Negara dapat segera terwujud.²⁸

Konsep terakhir yang disebutkan diatas memang belum termuat dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Langkah perubahan harus segera dilaksanakan terutama yang memerlukan terobosan hukum yang lebih cepat, proporsional, efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Perubahan/amandemen peraturan perundang-undangan sudah harus menjadi suatu kewajiban guna pemulihan keuangan Negara serta bentuk lain dalam pencegahan (*preventif*) sehingga indeks perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat jauh berkurang yang tentunya diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian di Indonesia.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan metode *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sudah mulai dilakukan oleh lembaga Kejaksaan RI dengan SE Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya Penyelidikan tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara dan apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat dalam upayanya mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka dijadikan suatu pertimbangan terkait kelanjutan proses hukumnya.

Kebijakan ini merupakan terobosan yang baik, mengingat banyaknya peristiwa yang terjadi di lapangan yakni, ketika seseorang sudah dijatuhi hukuman pidana badan oleh putusan pengadilan, yang sering terjadi adalah yang bersangkutan tidak akan lagi melakukan pembayaran denda apalagi pembayaran uang pengganti, karena berasumsi mengapa harus membayar lagi uang pengganti, sedangkan dia sudah dikenakan hukuman badan. Penggunaan anggaran Negara dalam tahapan proses penanganan perkara yang cukup besar, serta ditambah dengan biaya di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya tentunya akan membuat Negara bertambah rugi apabila tidak diimbangi dengan pemulihan keuangan Negara.

Pelaksanaan metode *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sudah mulai dilaksanakan namun masih terhambat dengan belum adanya payung hukum guna pelaksanaan metode ini secara baik dan menyeluruh.

²⁷ Yunizar Wahyu Tristanto, “Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia”, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6. No. 2. (2018). hlm.425.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85bee63862b/menggagas-peradilan-korupsi-yang-lebih-menguntungkan-keuangan-negara/>

2. Saran

Dalam usaha untuk meningkatkan pemulihan keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, perlu adanya suatu terobosan hukum dalam penanganannya. Metode *restorative justice* yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan RI merupakan salah satu terobosan terbaik dalam hal pemulihan keuangan Negara serta tidak menjadi pemborosan keuangan Negara khususnya dalam penanganan perkara sampai dengan tahapan eksekusi ataupun dalam pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya. Namun metode tersebut perlu diimbangi dengan adanya suatu payung hukum dan bukan hanya dalam surat edaran yang bersifat internal, sehingga seluruh aparat penegak hukum dapat melaksanakan terobosan yang sama. Selain itu diperlukan bentuk sanksi tambahan yang dikenakan oleh daerah/instansi kepada pihak yang terlibat guna penambahan efek jera kepada pihak lain serta apabila memang dalam tahapan penyelidikan tidak bisa dilakukan hal tersebut, maka kebijakan lain yang dapat kita lihat di Negara maju yaitu pendekatan *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement* dapat menjadi solusi yang efektif walaupun belum termuat dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Langkah-langkah perubahan harus segera dilaksanakan terutama yang memerlukan terobosan hukum yang lebih cepat, proporsional, efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Perubahan/amandemen peraturan perundang-undangan sudah harus menjadi suatu kewajiban guna pemulihan keuangan Negara serta bentuk lain dalam pencegahan (*preventif*) sehingga indeks perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat jauh berkurang yang tentunya diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Jakarta.
- Banziat, Kadafi. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Laegistimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. The Asia Jakarta.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lukman, Marcus. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi (Universitas Padjajaran). Bandung.
- Manan, Bagir. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Marsita, B.D. Sri, Humana. 2015. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan.
- Seno Adji, Indriyanto. 2012. *Korupsi Dan Permasalahannya*. 2012. Diadit Media Press. Jakarta.
- Shidarta. 2013. *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Thafa Media. Jakarta.

B. Jurnal

- Fitriati. "Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal melalui Peradilan Adat." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No.2, 2017: 164-171. <https://media.neliti.com/media/publications/238271-none-f6c2437d.pdf>.
- Kansil, F. I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP." *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3. No. 3, 2014: 26-34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809>.
- M.Syamsudin. "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 3, 2010: 406-429.

- <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3916/3491>.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art4>.
- Muhammad Gempa Awaljon Putra, D. d. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2. No. 2., 2018: 170-185. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11627/9168>.
<https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11627>.
- Nabil Atta Samandari, W. C. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik." *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol. 2. No. 2, 2016:154-164.
<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/viewFile/818/562>.
- Pandoe Pramoe Kartika, A. D. "Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo". *Jurnal Hukum Sarawati (JHS)*, Vol. 1 No. 2. 2019: 263-269. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/661/626>.
- Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 No.2 Desember, 2015: 269-288.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2318/1747>.
<http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.
- Prayitno, K. P. (2012). "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)". *Jurnal Dinamika Hukum Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman*. Vol. 12. No. 3, 2012: 407-420.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65>.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Saragih, Y. M. "Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Reseach Sains*. Vol. 1 No. 3 Oktober, 2015: 115-134.
<http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2015/10/Peranan-Jaksa-Dalam-Pengendalian-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>.
- Suhariyanto, B. "Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara". *Jurnal Rechtsviinding*. Vol. 5 No. 3 , 2016: 421-438. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>.
- Tajuddin, Y. M. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice*. Vol. 2 No.1, 2018: 52-66.
<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1924/1148>.
<https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.
- Tristanto, Y. W. "Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia". *AHKAM Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6. No. 2, 2018: 412-36.
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1467/757>.
<http://dx.doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.411-436>.
- Utary Maharani Barus, I. A. "Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Lubuk Pakam." *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1 No. 2, 2019: 187-193.
<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitr/article/view/121/130>.
- Waluyo, B. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, 2014: 169-182 . <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/149/122>.
<http://dx.doi.org/10.35586/v1i2.149>.
- Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo*, Vol. 2 No. 2, 2018: 123-130.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486>.
- Yusona Piadi, d. R. "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Recthen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1, 2019: 1-8.
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7/1>

C. Undang-undang

Amanat Jaksa Agung RI dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
Surat Edaran Internal Kejaksaan RI.
Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85bee63862b/menggagas-peradilan-korupsi-yang-lebih-menguntungkan-keuangan-negara>.